

MOCH.ARDIAANSYAH_19202010
0079

by Turnitin Indonesia

Submission date: 03-Oct-2023 07:53PM (UTC-0700)

Submission ID: 2179574660

File name: MOCH.ARDIAANSYAH_192020100079_3.docx (172.25K)

Word count: 5200

Character count: 33529



ANALISIS KINERJA BPD DALAM PEMBANGUNAN DESA

Moch. Ardiansyah
192020100079

Dosen Pembimbing
Isnaini Rodiyah, Dra.M.Si,Dr

Dosen Penguji
Isna Fitriah Agustina, M.Si
Nama Penguji (dengan gelar)

**Administrasi Publik
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Februari, 2023**

ANALISIS KINERJA BPD DALAM PEMBANGUNAN DESA

Moch. Ardiansyah¹⁾, Isnaini Rodiyah^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Indonesia

^{*}Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. This research aims to analyze the performance of BPD in village development. The type of research used in this research is qualitative using a descriptive approach. The data collection methods used were interviews, observation, and reviewing laws. The data analysis technique in this research uses data reduction, then followed by presenting the data and drawing conclusions, with the technique of determining informants using purposive sampling. The results of this research show that BPD performance in village development is reviewed from 5 indicators, the first is Quality. In terms of performance quality indicators, BPD and village officials are still not said to be of high quality. And we still need support from the community too. The second is Quantity, in this indicator the number of activities or programs has been determined. The third is Timeliness, in this indicator which is measured in Village Development in Lambangan Village it is still not said to be accurate and in accordance with the specified time until 2023. The fourth is Commitment, in this indicator in the Development of Lambangan Village it is said that there is sufficient commitment in the things planned. And finally, the fifth indicator of Independence, in this indicator the BPD can be seen from its high work spirit as shown in carrying out its duties without involving coercion from other people. The Lambangan Village BPD is still trying to uphold independence within the scope of the BPD itself. However, there are still many village officials who also participate in assistance with BPD tasks, although not all.

Keywords - Performance analysis, BPD, Village Development

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Kinerja BPD Dalam Pembangunan Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yakni wawancara, observasi, dan meninjau undang-undang. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni menggunakan reduksi data, kemudian disusul oleh penyajian data dan menarik kesimpulan, dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Kinerja BPD dalam Pembangunan Desa ditinjau dari 5 indikator, yang pertama Kualitas. Pada indikator Kualitas Kinerja BPD dan aparatur desa masih belum dikatakan berkualitas. Dan masih perlu dukungan dari masyarakat juga. Yang kedua Kuantitas, dalam indikator ini jumlah aktivitas atau program sudah ditentukan. Yang ketiga Ketepatan Waktu, dalam indikator ini yang diukur dalam Pembangunan Desa di Desa Lambangan masih belum dikatakan tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan hingga sampai tahun 2023 ini. Yang keempat Komitmen, pada indikator ini dalam Pembangunan Desa Lambangan sudah dikatakan cukup komitmen dalam hal-hal yang direncanakan. Dan yang terakhir kelima indikator Kemandirian, pada indikator ini BPD tersebut dapat ditinjau dari semangat kerja yang tinggi sebagaimana ditunjukkan dalam menjalankan tugasnya tanpa melibatkan paksaan dari orang lain. BPD Desa Lambangan bahwa masih berusaha menegakkan kemandirian dalam ruang lingkup BPD itu sendiri. Akan tetapi, masih banyak aparatur desa yang juga ikut dalam perbantuan tugas BPD walaupun tidak semua.

Kata Kunci - Analisis Kinerja, BPD, Pembangunan Desa

I. PENDAHULUAN

Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuanhidup berbangsa, pada sebagian besar masyarakat, pembangunan juga diartikan sebagai perwujudan fisik. Secara umum, pembangunan berarti segala upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan proses perencanaan (social planning) bagi para pejabat perencanaan pembangunan untuk melakukan perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan warga[1]. Pembangunan membawa banyak perubahan seperti pembangunan jalan yang lebar dan mulus, rumah sakit, pendidikan dan berbagai fasilitas umum seperti PDAM. Kita tidak boleh melupakan berbagai pilihan kenyamanan yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perubahan yang terjadi utamanya pada sarana fisik tersebut terjadi diseluruh wilayah Indonesia dari tingkat pusat, daerah hingga tingkat desa.

Berdasarkan UU No. 6/2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang dibatasi wilayah yang berwenang mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan ditegakkan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana, desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang dihuni oleh suatu komunitas yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. [2]. Posisi Desa secara administrasi pemerintahan berada pada level terbawah dan secara kuantitatif jumlah desa lebih banyak dari pada kelurahan.

Meskipun kegiatan pembangunan desa telah dilaksanakan, namun masih banyak desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal, hal ini terlihat dari belum adanya sarana dan prasarana. Selain itu, daerah pedesaan memiliki tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan dalam hal kualitas. Desa berada di tingkat administrasi pemerintahan terendah, dan secara kuantitatif jumlah desa lebih banyak dari pada kecamatan. Meskipun kegiatan pembangunan desa sedang dilakukan, masih banyak desa yang tergolong desa tertinggal, yang dibuktikan dengan minimnya sarana dan prasarana. Selain itu, tingkat kesejahteraan sosial ekonomi secara kualitatif di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Desa memiliki masalah yang lebih besar. Masalah-masalah tersebut antara lain kemiskinan, kesehatan dan konsumsi, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat pendidikan. Kondisi desa yang berbeda digunakan sebagai tolok ukur untuk mengklasifikasikan desa. Berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2018, jumlah desa di Indonesia yang diklasifikasikan sebagai desa mandiri sebanyak 7,55%, desa berkembang sebanyak 74,49%, dan desa tertinggal sebanyak 17,96%[3]. Setiap kategori desa tersebut menyimpan berbagai masalah, agar pembangunan desa sesuai dengan keinginan masyarakat maka diperlukan perencanaan pembangunan dengan dibentuknya suatu Lembaga BPD yang disesuaikan dengan undang-undang.

Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 pemerintahan desa berkewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat ditampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan[4]. Pada dasarnya BPD wajib menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD juga merupakan lembaga penasihat di tingkat desa, yang ikut serta dalam pembahasan dan kesepakatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sisi lain, Badan Permusyawaratan Desa yang lahir atau dibentuk berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 1999, digambarkan memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan desa. Hal ini dikarenakan desa berhubungan langsung dengan pemerintah kota [5].

Sebagai lembaga legislatif tingkat desa, selain mewakili masyarakat, BPD memiliki kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi, baik dalam mengawasi pemerintah desa maupun meningkatkan partisipasi masyarakat. BPD juga bertujuan sebagai wadah politik bagi masyarakat desa untuk mengkomunikasikan pemikiran dan gagasannya agar pembangunan dan kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Pembangunan dan kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila BPD berperan aktif dalam pelaksanaan misi dan fungsinya. Namun, pada praktiknya, sebagian besar masyarakat di berbagai desa lainnya belum mengetahui mandat dan fungsi BPD, terutama dengan semakin meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014, Pasal 55 menetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas sebagai berikut: (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (2) menyerap dan menampung aspirasi masyarakat desa; dan (3) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi-fungsi BPD yang telah dijelaskan tersebut harus dijalankan secara optimal sebagai bentuk Kinerja

BPD. Secara khusus, konsep kekuasaan telah dijelaskan oleh para ahli seperti: Kinerja oleh Bernadian et al. dalam Sedarmayanti [6], Kinerja didefinisikan sebagai "catatan hasil yang diperoleh dari aktivitas tertentu selama periode waktu tertentu [7], "Prestasi adalah keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas." Laporan lain dari Wibowo dari Pangewa [8], "Hal ini menunjukkan bahwa kinerja memiliki arti yang lebih luas, tidak hanya mencakup hasil kerja, tetapi juga proses kerja. Keempat, Murphy dari Pangewa [9], "Kinerja adalah serangkaian tindakan yang berhubungan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Dari beberapa pandangan tersebut, kinerja didefinisikan sebagai fungsi-fungsi profesional atau kegiatan individu atau kelompok dalam suatu organisasi selama periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini konsep kinerja yang digunakan berdasarkan teori analisis kinerja dari Robbins (2006) yang memiliki 5 indikator antara lain : Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Komitmen, Mandiri [10]. Dari 5 indikator tersebut, yang terkait dengan penelitian ini adalah Ketepatan Waktu dan Komitmen. Jika dilihat dari segi koordinasi dengan hasil keluaran dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk kegiatan lain, ketepatan waktu adalah tingkat kegiatan yang selesai pada awal waktu yang ditentukan (Robbins, 2016: 261). Ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kinerja seorang karyawan. agar tidak bertentangan dengan pekerjaan lain yang diwajibkan bagi pegawai dalam rangka tugasnya [10]. Sebaliknya komitmen adalah tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi (termasuk waktu, uang, teknologi, dan bahan baku) yang dimaksimalkan guna meningkatkan kinerja setiap unit dalam menggunakan sumber daya (Robbins, 2016: 261). bahwa pada saat sumber daya yang digunakan, baik sumber daya manusia yang sebenarnya maupun sumber daya yang berupa teknologi, modal, informasi, dan bahan baku [10].

Dengan demikian Kinerja BPD harus berkualitas, harus mencapai target, waktu dilakukan dengan sesuai yang direncanakan, dan berkomitmen. Namun kinerja BPD ditemukan adanya beberapa masalah, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terdahulu, antara lain : Yang pertama Penelitian dari Lismawati, Murdiansyah Herman, dan Fika Fibriyanti, yang berjudul "*Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan*" Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan sampel atau informan pada penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling. Serta Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi dan kinerja BPD Desa Buntu Karau dalam Perencanaan Pembangunan Desa dengancara melaksanakan hasil musyawarah sehingga memiliki kinerja yang positif dalam pengelolaan dana desa karena BPD selalu mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat untuk aktif mengelola dana desa [11]. Selanjutnya, penelitian dari Anak Agung Ngurah Gede Surya Yoga Adnyana Putra, Gede Marhaendra Wija Atmaja, dan Ni Made Ari Yulianti Griadhi, yang berjudul "*Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan*" Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara keadaan teori dengan fakta hukum. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan pendekatan fakta. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi, wawancara, dan hasil dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat masih belum efektif dan harus ditingkatkan lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja BPD masih sama-sama belum maksimal dalam aktivitas kinerjanya dan belum menerapkan secara baik dan tersusun. [12]. Dan yang terakhir penelitian dari Sonny Walangitan yang berjudul "*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*". Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi pada penelitian ini adalah Desa Kanonang II Kabupaten Minahasa. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di desa Kanonang II. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Desa Kanonang II Kabupaten Minahasa dalam peranan BPD dalam Perencanaan Pembangunan belum dikatakan maksimal dalam pencapaiannya, karena banyak munculnya permasalahan terutama dari SDM sendiri.

Permasalahan yang dijelaskan oleh beberapa penelitian terdahulu tersebut juga terjadi di Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu, bahwa terdapat rendahnya Kinerja BPD dalam Pembangunan di Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu. Berikut adalah beberapa indikator permasalahan :

**Tabel 1 . Data Pembangunan Desa Lambangan
Tahun 2019-2023**

NO	PERMASALAHAN	TARGET	REALISASI
1	Pembangunan jalan paving di lintasan pemukiman sawah yang terbengkalai	100%	40%/0,16 hektar
2	Saluran irigasi sawah tersumbat	100%	40%
3	Aspirasi masyarakat kurang di respon	100%	30%
4	Kinerja BPD Desa Lambangan kurang optimal	100%	35%

Sumber : Diolah oleh penulis dari Data Desa

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa dari beberapa indikator permasalahan dari tahun 2019 hingga 2023, Pembangunan yang sudah selesai pada tahun 2021 yaitu Pemberdayaan saluran pertanian. Kemudian ada juga yang masih belum selesai hingga akhir tahun 2022, yaitu Pembangunan jalan sawah tebu yang awal target penyelesaian di tahun 2022 awal, hingga akhir 2022 masih terbengkalai dikarenakan pada saat itu pandemi covid menjadi halangan. Dan saat ini tahun 2023 masih banyak pembangunan Desa Lambangan yang belum ada kemajuan dalam target perencanaan pembangunan dari Kinerja BPD Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan sudah cukup jelas terlihat, dan juga target kedepan sudah dipikirkan. Akan tetapi rendahnya Kinerja BPD Desa Lambangan masih dikatakan belum optimal sepenuhnya, serta dorongan dari masyarakat juga minim. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Pembangunan Desa Lambangan masih belum jelas kapan bisa mewujudkan harapan dan target untuk kedepannya.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam analisis kinerja BPD dalam pembangunan desa ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki keunggulan dalam meneliti keadaan objek yang alamiah yang digunakan untuk mendapatkan data turunan sesuai dengan fakta dilapangan. Dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja BPD Desa Lambangan dalam Pembangunan Desa tersebut. Dengan menganalisa penelitian ini dapat menemukan hasil analisa yang valid. Untuk memahami dan mempelajari fenomena yang ada, peneliti harus terus mencari informasi yang relevan dalam penelitiannya [14]. Penelitian dilakukan di Balai Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu dan Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan beberapa informan. Ketua BPD Desa Lambangan, wakil BPD, sekretaris, dan beberapa anggota lainnya. Serta beberapa masyarakat dari Desa Lambangan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan pengumpulan data dilakukan dalam periode waktu tertentu. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Fokus penelitian ini adalah analisis kinerja BPD dalam pembangunan desa. Dengan tujuan untuk mengetahui kinerja BPD dalam pembangunan desa sudah dalam penerapan secara maksimal atau masih belum diterapkan dengan konsep kinerja yang sesuai. Pengelolaan penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hal ini berarti mengumpulkan data (data collection) dan mereduksi data yang diperoleh di lapangan dengan beberapa tahapan (data reduction), yaitu mengkategorikan dan memfokuskan pada tujuan penelitian. Kemudian, sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian analisis kinerja BPD

dalam pembangunan desa di Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati asal-usul dan adat istiadat setempat, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan mempunyai kekuasaan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat Indonesia. Robbins (2006) menjelaskan bahwa Kinerja merupakan pengukuran terhadap hasil kerjaya yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Yang memiliki 5 indikator yakni : 1) Kualitas 2) Kuantitas 3) Ketepatan Waktu 4) Komitmen 5) Kemandirian. Dengan demikian, peneliti mengambil dua variabel yakni Ketepatan Waktu dan Komitmen dari kelima indikator tersebut sebagai dimensi dalam penelitian kinerja BPD Desa Lambangan dalam Pembangunan Desa yang akan diuraikan antara lain yakni sebagai berikut :

A. Kualitas

Indikator kualitas dapat diukur melalui persepsi petugas tentang kualitas pekerjaan dan kesempurnaan dalam melakukan tugas, yang mencakup keterampilan dan kemampuan mereka. (Robbins, 2006). Seseorang dapat dinilai berdasarkan kualitasnya. Jika petugas pemerintah desa memiliki kualitas kerja yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan publik, kinerja mereka akan berjalan dengan baik. Menurut Robbin (2016:260) Sejauh mana tugas diselesaikan dengan sempurna sehubungan dengan keterampilan dan kemampuan karyawan juga dapat digunakan untuk mengukur kualitas. Tingkat berhasil atau tidaknya penyelesaian pekerjaan pegawai serta bakat dan keahlian pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas pekerjaan. Berikut adalah hasil wawancara terkait kualitas yang dibuktikan dalam wawancara pada 2 orang dari RT 01 dan RT 04 yang bernama Pak Koirudin dan Pak Purwanto. Dalam wawancara tersebut saya bertanya "Bagaimana Kinerja aparatur desa terutama peran BPD. Desa Lambangan ini dalam Pembangunan Desa di Lambangan ?. Apakah sudah dikatakan berkualitas, atau menurut kalian masih kurang maksimal ? dan untuk menjawabnya saya akan lampirkan tingkat jawaban kepuasan juga kepada bapak selaku ketua RT dari Desa Lambangan dan beberapa warga sekitar sebagai perwakilan ?". Kesimpulan dari jawaban 2 orang tersebut yang termasuk ketua RT dari RT 01 dan RT 04 bahwa "Kualitas aparatur desa Lambangan terutama kinerja BPD masih belum sempurna sih mas, ya kayak belum maksimal dalam terlibat pembangunan desa Lambangan yang sudah banyan direncanakan tapi belum selesai. Begitupun para warga ya sudah capek untuk berbicara atau tanya tanya tentang kelanjutan pembangunan yang belum selesai sampai saat ini. Ya harapan kami sebagai warga cuma ingin bagaimana kualitas kinerja baik perangkat desa, aparatur desa lainnya, terutama BPD dan Kepala Desa agar menjadikan desa ini semakin maju dan berkualitaslah seperti desa-desa maju lainnya".

Dapat disimpulkan bahwa dari pertanyaan dan jawaban dari ketua RT 01 dan 04 dan beberapa tanggapan warga desa Lambangan yang sering terdengar, bahwa Kualitas aparatur desa terutama BPD Desa Lambangan masih belum dikatakan berkualitas. Akan tetapi kerja sama warga juga harus diperhatikan, warga juga harus ikut membantu dalam hal mendukung desa menjadi maju, dan tidak bertindak sesuka hati juga. Warga juga harus bisa memahami kondisi aparatur desa, begitupun aparatur desa juga harus bisa mengayomi warga dengan sebaik mungkin. Permasalahan ini juga menjadi persamaan pada penelitian terdahulu yang juga terjadi pada kualitas kinerja aparatur desa terutama BPD desa yang terkait.

B. Kuantitas

Kuantitas dalam kinerja petugas pemerintahan desa terdiri dari jumlah petugas, kegiatan, dan tugas pokok yang harus diselesaikan oleh petugas. Ini dapat digambarkan sebagai jumlah unit, siklus aktivitas, atau kegiatan yang dihasilkan. Setiap desa memiliki rencana operasi dan staf pemerintahan yang menangani tugas-tugas tertentu.

Pada kegiatan pembangunan yang disusun atau direncanakan di Desa Lambangan ada 2 antara lain Pembangunan jalan paving di lintasa sawah dan juga saluran irigasi sawah. Pembangunan jalan paving di sekitar pemukiman sawah ini masih dikatakan belum selesai dan terbengkalai, hanya saja yang sudah terealisasi 0,16 hektar dari 1000 meter X 4 meter. Dengan harapan realisasi 100% , tapi hingga saat ini masih 40% realisasinya. Untuk yang pembangunan kedua yaitu pembenahan saluran irigasi sawah juga masih 40% dalam realisasi. Jadi dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa Lambangan, kedua pembangunan infrastruktur ini belum selesai 100%, masih dikatakan dalam realisasi yang belum tuntas. Hal ini menjadi dorongan untuk Kinerja BPD desa Lambangan dalam berupaya mempercepat pembangunan desa ini. Dengan harapan aspirasi para warga juga didengarkan dan sama sama menjalin kerja sama yang baik antara aparat desa dan juga warga desa Lambangan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut. Saya sebagai peneliti bertanya “Menurut Bapak Mulyanto, selaku Kepala Desa Lambangan, dalam menyusun kegiatan atau tugas pokok apakah memiliki jumlah tertentu dalam menyusun kegiatan atau tugas pokok petugas pemerintah desa?”. Bapak Mulyanto menjawab “untuk penyusunan kegiatan atau tugas pokok perangkat sendiri sudah sesuai dengan jobdesk, saya biasanya mengikuti hal biasa dengan menentukan program serta tugas pokok yang memang harus diselesaikan, akan tetapi untuk ketentuan jumlahnya tidak bisa dipastikan mas. Tapi ya pasti memang berjumlah, tapi selalu berubah rubah secara kuantitasnya mas, seperti saat ini yang ada dalam perencanaan pembangunan desa ada dua, dan itu masih terealisasi 40-50% lah. Dan masih belum mencapai 100%. Hal ini yang saat ini kita usahakan dengan semaksimal mungkin setelah pandemi covid 19 dan mulai kembali normal. Semoga saja tidak sampai tahun depan mas, bangunan tersebut selesai dengan baik.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan juga penjelasan diatas bahwa sudah dijelaskan terkait Kuantitas menurut teori Robbins(2006) adalah jumlah kegiatan atau jumlah aktivitas yang dilakukan. Dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lambangan bahwa ada dua pembangunan infrastruktur yang masih belum 100% dalam realisasinya. Begitupun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sama sama menggunakan teori Robbins (2006) dalam mengaitkan analisa kinerja BPD kedalam 5 indikator, salah satunya Kuantitas yang memang bertujuan untuk mengetahui jumlah aktivitas yang harus diselesaikan aparat desa/petugas dengan sebaik mungkin.

C. Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu ialah jumlah tugas yang dapat diselesaikan pada waktu yang ditentukan, ditinjau dari sudut pandang koordinasi dengan hasil output, dan dengan memaksimalkan waktu yang tersedia. (Robbins, 2006). Kedisiplinan terkait dengan ketepatan waktu. Sebagai ujung tombak dalam proses pelayanan publik, segala kegiatan yang membutuhkan waktu dapat diukur oleh petugas pemberi pelayanan publik.

Dalam indikator Ketepatan Waktu yang diukur dalam Pembangunan Desa di Desa Lambangan masih belum dikatakan tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada tahun 2019 Desa Lambangan sendiri memulai dalam perencanaan pembangunan desa dalam hal infrastruktur hingga tahun ini masih belum selesai. Dari pembangunan jalan hingga renovasi saluran irigrasi sawah yang masih saat ini dalam tahap proses. Dimana kurun waktu 4 tahun, masih belum tepat waktu penyelesaiannya. Hal ini dikaitkan bagaimana Kinerja BPD Desa Lambangan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut. Serta aspirasi masyarakat yang masih minim dalam respon yang cepat atau tindakan yang lebih baik. Berikut adalah data ketepatan waktu dalam beberapa indikator pembangunan desa sebagai berikut :

**Tabel 3 . Data Ketepatan Waktu Pembangunan Desa Lambangan
Tahun 2019-2023**

VARIABEL/INDIKATOR	TARGET PENYELESAIAN	KENYATAAN
Pembangunan Jalan Paving di lintasan pemukiman sawah	2019-2022	2019-2023
Saluran Irigasi Sawah Tersumbat	2019-2022	2019-2023

Pada tabel 3, terdapat 2 variabel/indikator dalam pembangunan desa yang tertera dengan target penyelesaian yang seharusnya. Akan tetapi terdapat permasalahan-permasalahan sehingga tidak sesuai dengan target ketepatan waktu yang ditentukan. Seperti pada variabel pertama yaitu Pembangunan jalan paving di lintasan pemukiman sawah di desa Lambangan yang mempunyai target penyelesaian pada awal pembangunan dimulai pada tahun 2019 akhir, dengan target penyelesaian di akhir tahun 2022. Hingga pada kenyataannya, sampai saat ini tahun 2023 masih belum selesai dengan maksimal, karena banyak beberapa permasalahan. Variabel yang kedua yaitu Saluran irigasi Sawah yang masih sering tersumbat, hal ini juga sama dengan variabel pertama. Dalam ketepatan waktu penyelesaiannya juga tidak tepat. Dengan target penyelesaian akhir 2022, hingga sampai saat ini 2023 yang mau diujung akhir tahun masih belum selesai dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan waktu yang dipaparkan dengan penelitian ini menjelaskan bahwa dalam Kinerja BPD terkait Pembangunan Desa Lambangan masih belum maksimal atau dikatakan masih sangat kurang tepat.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada ketua BPD Desa Lambangan Bapak Heru Siswanto. *"Menurut bapak sendiri sebagai ketua BPD desa Lambangan dalam menanggapi pembangunan infrastruktur yang sudah dilaksanakannya, tetapi hingga saat ini belum selesai? Tanggapan bapak bagaimana ? awal mula proses pembangunan tersebut dan kenapa hingga saat ini belum selesai ? apa tidak ada target tahun berapa harus selesai atau bagaimana pak ?".* Bapak Heru menjelaskan *"Begini mas, dalam pembangunan infrastruktur ini atau pembangunan jalan paving dan saluran irigasi tersebut direncanakan sudah lumayan lama, dan baru dilaksanakan atau baru dilakukan perbaikan pada tahun 2019 mas. Akan tetapi waktu pandemi covid tahun berapa itu mas kisaran 2020 an lah itu kan lumayan lama ya, jadi ya gimana mas soal dana pun kita berkurang, serta banyak kegiatan yang dirumahkan. Dan masih banyak hal hal yang sulit lah pada saat itu. Jadi asal mulanya ga selesai ya karena itu mas sebabnya. Tetapi diusahakan tahun 2023 ini insya allah berjalan cepat lah mas pembangunan yang sudah lama tidak dilanjut ini. Semoga tidak sampai tahun 2024. Serta saya sebagai ketua BPD juga perlu dukungan dana dan aspirasi masyarakat yang membangun dan mendukung dengan baik, tanpa adanya perkataan yang kasar atau fitnah fitnah tertentu lah mas. Kan saya juga manusia, sama sama tidak luput dari kesalahan. Intinya saya berusaha semaksimal mungkin dalam kinerja saya dan aparat desa lainnya dalam mewujudkan pembangunan desa yang maju".*

Dapat disimpulkan penjelasan pada indikator ketepatan waktu bahwa menurut ketua BPD desa Lambangan penyebab utama terbengkalainya pembangunan-pembangunan yang sudah dijalankan adalah pada saat pandemi covid 19 di tahun 2020. Dan itu memang istirahat lama dalam aktivitas serta dana dukunganpun juga menurun. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah aspirasi masyarakat pada penelitian ini tidak cepat direspon atau ditanggapi. Sedangkan penelitian terdahulu aspirasi masyarakat pun menjadi dukungan dan memberikan semangat sendiri pada aparat desa serta membantu BPD dalam mewujudkan desa yang maju tanpa menyalahkan sepihak.

D. Komitmen

Indikator komitmen berarti seorang pejabat mempunyai komitmen untuk bekerja dengan baik pada instansinya, bersungguh-sungguh melaksanakan tugas pokoknya dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap instansi dan tempat kerjanya [10].

Dalam hal ini, perwakilan desa dituntut untuk menjamin dedikasi seseorang dalam bekerja. Komitmen perwakilan pemerintah desa dapat dinilai dari seberapa baik mereka menjalankan tugasnya dan seberapa serius mereka menjalankan tanggung jawabnya. Komitmen di tempat kerja menumbuhkan integritas dan mendorong kolaborasi antara organisasi dan agen lainnya. Perwakilan pemerintah desa yang memiliki komitmen tinggi akan merasa bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Setiap tugas di kantor desa akan diselesaikan dengan cermat dan tuntas. Kepala desa mempunyai tanggung jawab memimpin aparatur pemerintahan desa, termasuk menanamkan rasa akuntabilitas pada setiap aparatur agar mempunyai sikap positif dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam indikator Komitmen yang diukur dalam Pembangunan Desa Lambangan sudah dikatakan cukup komitmen dalam hal-hal yang direncanakan. Berkomitmen dalam Pembangunan Desa Lambangan yang diantaranya memperbaiki infrastruktur, memperbaiki saluran irigasi sawah, dan menampung segala bentuk aspirasi masyarakat. Susunan yang direncanakan sudah berkomitmen dengan Kepala Desa dan perangkat desa serta masyarakat juga. Tetapi dalam berkomitmen banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga komitmen dalam pembangunan masih banyak yang belum terselesaikan dengan tepat waktu. Masalah salah satunya adalah pada saat Pandemi Covid 19 yang mengorbankan banyak hal seperti kendala financial dan banyaknya perusahaan tutup.

Terbukti pada hasil wawancara pada Ketua BPD Desa Lambangan Bapak Heru Siswanto, dengan pertanyaan sebagai berikut *"Menurut Bapak Heru sendiri selaku Ketua BPD Desa Lambangan, dalam hal pembangunan desa dengan sesuai komitmen yang sudah dibicarakan, apakah ini benar berjalan sesuai atau bagaimana Pak ? dalam hal komitmen kan harus sudah sesuai jobdesk yang ada ?"*. Bapak Heru menjawab *"Menurut saya pribadi untuk susunan yang direncanakan atau program yang akan dijalankan sudah berkomitmen dengan beberapa orang yang terkait. Terutama Bapak Kepala Desa Lambangan, dan beberapa perangkat yang terkait. Akan tetapi hal komitmen pun bisa jadi tidak sesuai mas, kayak tiba-tiba ada masalah yang terjadi. Seperti tahun kemarin itu adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak rencana pembangunan desa yang masih belum selesai sampai saat ini. Maka dari itu kalau dikatakan komitmen ya komitmen mas hehe, akan tetapi kadang tidak sesuai ekspektasi"*.

Dapat disimpulkan bahwa penjelasan diatas dengan dibuktikan hasil wawancara bahwa tidak jauh beda dengan indikator ketepatan waktu. Dengan ini indikator komitmen sudah dikatakan berkomitmen. Akan tetapi ada satu penyebab yang dikatakan ketua BPD desa Lambangan yaitu komitmenpun tidak sesuai dikarenakan pandemi covid semua tidak sesuai dengan rencana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini komitmen tidak sesuai, sedangkan penelitian sebelumnya sesuai tanpa adanya penyebab besar yang menjadi masalah utama.

E. Kemandirian

Kemandirian BPD Desa Lambangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap aparatur yang melayani, khususnya bagi aparatur pemerintah yang berperan menjalankan sistem pemerintahan. Salah satunya adalah independensi BPD, yaitu kualifikasi seorang pejabat yang mampu melaksanakan tugasnya secara mandiri, yaitu tidak bergantung pada orang lain, serta dapat bertanggung jawab dan mampu membedakan langkah yang benar dan salah diambil. [15].

kemandirian BPD Desa Lambangan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya mungkin dipengaruhi oleh tingkat kualitas masing-masing pejabatnya. Independensi BPD diwujudkan dalam etos kerja yang tinggi, ditunjukkan dengan menjalankan tugas tanpa dipaksa oleh orang lain. Hal ini terlihat dari kualitas pribadi para agen yang mampu memotivasi dirinya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa tanpa campur tangan orang lain. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri BPD Desa Lambangan dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini dibuktikan pada hasil wawancara dengan wakil BPD Desa Lambangan. *"Menurut Ibu Amina, dalam indikator kemandirian. Apakah tugas BPD sendiri sudah dikatakan mandiri dalam tugas yang terkait yang sudah sesuai dengan tugas pokok BPD itu sendiri, apa masih belum bu ?"*. Ibu Amina berkata *"Untuk kemandirian dalam tugas BPD itu kami sudah berusaha mandiri mas dalam hal tugas pokok atau jobdesk yang ditentukan. Akan tetapi dalam perbantuan atau keadaan yang memang kita benar butuh bantuan yang cepat, kita biasanya minta bantuan pada perangkat lain, biar target berjalan cepat sesuai waktu yang ditentukan. Jadi kalau dikatakan mandiri, kita sudah berusaha mandiri mas dan berusaha menyelesaikan tugas BPD dengan perangkat yang terkait."*

Dapat disimpulkan dengan penjelasan diatas serta bukti wawancara dengan wakil BPD Desa Lambangan bahwa masih berusaha menegakkan kemandirian dalam ruang lingkup BPD itu sendiri. Akan tetapi, masih banyak aparatur desa yang juga ikut dalam perbantuan tugas BPD walaupun tidak semua. Tetapi masih berusaha membantu tugas BPD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama masih ada perbantuan dari aparatur desa lainnya. Kecuali tugas pokok BPD yang memang harus bisa diselesaikan BPD dan juga rekan terkait BPD.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 pemerintahan desa berkewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat ditampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan. BPD juga merupakan lembaga penasihat di tingkat desa, yang ikut serta dalam pembahasan dan kesepakatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan bertujuan sebagai wadah politik bagi masyarakat desa untuk mengkomunikasikan pemikiran dan gagasannya agar pembangunan dan kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Pembangunan dan kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila BPD berperan aktif dalam pelaksanaan misi dan fungsinya.

Dalam penelitian ini konsep kinerja yang digunakan berdasarkan teori analisis kinerja dari Robbins (2006) yang memiliki 5 indikator antara lain : Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Komitmen, Mandiri. Dari 5 indikator tersebut, yang terkait dengan penelitian ini adalah Ketepatan Waktu dan Komitmen. Peneliti mengambil dua variabel yakni Ketepatan Waktu dan Komitmen dari kelima indikator tersebut sebagai dimensi dalam penelitian kinerja BPD Desa Lambangan dalam Pembangunan Desa yang akan diuraikan antara lain yakni Ketepatan Waktu dan Komitmen. Dalam indikator Ketepatan Waktu yang diukur dalam Pembangunan Desa di Desa Lambangan masih belum dikatakan tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada tahun 2019 Desa Lambangan sendiri memulai dalam perencanaan pembangunan desa dalam hal infrastruktur hingga tahun ini masih belum selesai. Sedangkan Dalam indikator Komitmen yang diukur dalam Pembangunan Desa Lambangan sudah dikatakan cukup komitmen dalam hal-hal yang direncanakan. Berkomitmen dalam Pembangunan Desa Lambangan yang diantaranya memperbaiki infrastruktur, memperbaiki saluran irigasi sawah, dan menampung segala bentuk aspirasi masyarakat. Susunan yang direncanakan sudah berkomitmen dengan Kepala Desa dan perangkat desa serta masyarakat juga. Tetapi dalam berkomitmen banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga komitmen dalam pembangunan masih banyak yang belum terselesaikan dengan tepat waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih banyak kepada lokasi penelitian saya Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, beserta Kepala Desa Lambangan, Ketua BPD Desa Lambangan, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, anggota BPD, dan Masyarakat setempat. Serta terima kasih juga kepada Orang tua saya dan teman kuliah saya yang sudah mendukung saya dalam menyelesaikan penelitian ini hingga selesai.

REFERENSI

- [1] Nurcholis, D. T. (n.d.). *Konsep dan Teori Pembangunan*. Jakarta: Pustaka.

- [2] Tjokrowinoto, M. (1996). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- [3] Dwi Agus Pratiwi, M. T. (2019). *Indeks Pembangunan Desa 2018*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- [4] Taliziduhu. (2001). *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- [5] Suhadi. (2007). *Jurnal Hukum - pandecta*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- [6] Sedarmayanti (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT.Refika Aditama
- [7] Sutrisno Eyd. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana
- [8] Wibowo (2013). *Manajemen Kinerja*. Edisi ketiga. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta
- [9] Pangewa, Maharuddin (2013). *Pengaruh Budaya Organisasi dalam Peningkatan Kinerja*. Makassar : Badan Penerbit UNM
- [10] Robbins, S. P. (2006). *Indikator Kinerja Karyawan*.
- [11] Lismawati, M. H. (2021). Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. *Uniska*.
- [12] Yoga Adnyana Putra, A. A. (2019). Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan. *Journal Ilmu Hukum - Kertha Negara*.
- [13] Walangitan, S. (n.d.). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat).
- [14] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- [15] Rosman. "Analisis Kinerja Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau." *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2014

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

stia-binataruna.e-journal.id

Internet Source

4%

2

Mardawani Mardawani, Agnesia Hartini, Natalia Natalia. "ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA EMPAKA KEBIAU RAYA KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG", JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2021

Publication

3%

3

www.researchgate.net

Internet Source

2%

4

Submitted to Universiti Teknologi Petronas

Student Paper

1%

5

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

1%

6

es.scribd.com

Internet Source

1%

7	Hardijanto. "Peran IT Capability Dalam Memoderasi Pengaruh Workload dan Work Stress Terhadap Kinerja SDM", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
8	id.wikipedia.org Internet Source	1 %
9	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	1 %
10	ojs.uma.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
12	id.scribd.com Internet Source	1 %
13	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On